



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah

Analysis of the Implementation of Decentralization Policy in Improving Public Services in Regional Governments

Sampar^{1*}, Sultan Hasanudding²

¹Universitas Tomakaka, Email : samparsampar1212@gmail.com

²Universitas Tomakaka, Email : sultanhasanudding12@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: samparsampar1212@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Kata Kunci:

Desentralisasi;
Pelayanan Publik;
Pemerintah Daerah;
Kepemimpinan;
Partisipasi Masyarakat

Keywords:

Decentralization;
Public Service;
Local Government;
Leadership;
Community Participation

DOI: 10.56338/jks.v8i9.8564

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat. Desentralisasi dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Sulawesi Barat telah memperluas akses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, namun kualitas layanan belum merata antarwilayah. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dukungan regulasi pusat, kepemimpinan daerah yang visioner, serta adopsi digitalisasi pelayanan publik. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat, birokrasi yang belum profesional, serta rendahnya partisipasi substantif masyarakat dalam forum perencanaan. Penelitian juga menemukan bahwa kepemimpinan daerah dan partisipasi publik merupakan elemen kunci keberhasilan desentralisasi. Kepala daerah yang reformis mampu mendorong inovasi pelayanan publik, sementara partisipasi masyarakat yang bermakna dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan. Strategi peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat perlu difokuskan pada reformasi birokrasi berbasis merit system, penguatan kapasitas fiskal, transformasi digital, serta literasi politik masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi di Sulawesi Barat memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi bukan hanya distribusi kewenangan, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of decentralization policies in improving public services in West Sulawesi Province. Decentralization is regarded as an important instrument to strengthen regional autonomy and enhance the quality of public services that are responsive and aligned with the needs of local communities. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and document study, as well as interactive analysis using the Miles and Huberman model. The findings indicate that decentralization in West Sulawesi has expanded access to health, education, and civil administration services; however, the quality of services remains uneven across regions. Supporting factors for policy implementation include the existence of central regulatory support, visionary local leadership, and the adoption of public service digitalization. Conversely, inhibiting factors include limited fiscal capacity, dependence on central government transfers, an under-professional bureaucracy, and low substantive community participation in planning forums. The study also found that local leadership and public participation are key elements for the success of decentralization. Reform-minded regional leaders are able to encourage innovation in public services, while meaningful community participation can enhance the accountability and legitimacy of policies. Strategies for improving public services in West Sulawesi should focus on merit-based bureaucratic reform, strengthening fiscal capacity, digital transformation, and political literacy among citizens. Thus, decentralization in West Sulawesi requires synergy between the central government, local governments, and communities in order to function as an instrument for equitable development and the improvement of public welfare. This study emphasizes that decentralization is not merely the distribution of authority, but also a continuous effort to create inclusive, adaptive, and just public services

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan strategis yang diterapkan di Indonesia pasca reformasi untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, meskipun sudah berjalan lebih dari dua dekade, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait sejauh mana pelayanan publik dapat diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh lapisan masyarakat (Arifianto, 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, desentralisasi seharusnya mampu menjadi instrumen peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antar daerah dalam hal kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Penelitian Pratama dan Nugroho (2020) menegaskan bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi lebih mampu memberikan layanan berkualitas dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga memunculkan ketimpangan pelayanan.

Selain aspek fiskal, peran birokrasi daerah juga sangat menentukan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Kualitas pelayanan publik sering kali terhambat oleh birokrasi yang masih kaku dan patrimonial. Reformasi birokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur ternyata belum berjalan optimal di banyak daerah. Menurut Kurniawan (2021), lemahnya sistem merit dan tingginya praktik politisasi birokrasi menyebabkan pelayanan publik cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara desain kebijakan desentralisasi dengan praktik implementasinya. Faktor kepemimpinan daerah juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan desentralisasi. Kepala daerah yang memiliki visi dan komitmen terhadap reformasi pelayanan publik terbukti mampu membawa perubahan positif. Wahyudi (2022) menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional kepala daerah mendorong inovasi dalam pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, perbedaan kualitas kepemimpinan turut memperkuat variasi hasil implementasi kebijakan desentralisasi antar daerah.

Partisipasi masyarakat pun menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas desentralisasi. Konsep *governance* menekankan bahwa pelayanan publik yang baik membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, penelitian Sari dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa forum partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi telah dibuka, implementasinya belum maksimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Selain faktor internal pemerintah daerah, intervensi dari pemerintah pusat juga turut memengaruhi keberhasilan desentralisasi. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, memberikan supervisi, dan melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah daerah. Namun, ketidakseimbangan antara otonomi daerah dan pengawasan pusat sering kali menjadi dilema. Lubis (2019) menegaskan bahwa intervensi pusat yang terlalu dominan dapat membatasi ruang inovasi daerah, sementara lemahnya pengawasan justru menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh elit lokal. Hal ini menunjukkan perlunya desain relasi pusat-daerah yang lebih seimbang. Tantangan implementasi desentralisasi juga terlihat dari masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa misalnya, tampak jelas dalam kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Studi Simanjuntak (2020) mengungkapkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan ini, sehingga diperlukan mekanisme afirmatif berupa transfer fiskal yang lebih proporsional agar pelayanan publik di daerah tertinggal dapat ditingkatkan.

Desentralisasi pada dasarnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Penelitian Rahman (2021) menunjukkan bahwa daerah yang aktif melakukan inovasi digital dalam pelayanan publik, seperti sistem perizinan online, mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengadopsi inovasi, terutama daerah dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi. Banyak daerah masih menghadapi kendala rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada masyarakat. Menurut Putri dan Santoso (2023), pelatihan dan peningkatan kualitas SDM melalui sistem merit menjadi kebutuhan mendesak agar birokrasi daerah mampu mengimbangi tuntutan desentralisasi. Tanpa penguatan kapasitas aparatur, desentralisasi berpotensi hanya menjadi transfer kewenangan tanpa peningkatan kinerja pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat memperkuat implementasi desentralisasi. Digitalisasi pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan secara cepat, murah, dan transparan. Penelitian oleh Nugraha dan Suryadi (2024) menegaskan bahwa integrasi e-government dalam sistem pelayanan publik daerah mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi praktik korupsi, serta memperluas jangkauan layanan. Oleh karena itu, digitalisasi dapat menjadi katalis dalam mempercepat transformasi pelayanan publik di era desentralisasi. Selain digitalisasi, faktor akuntabilitas dan transparansi juga menjadi kunci dalam keberhasilan desentralisasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik pelayanan publik di daerah masih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut Hakim (2022), rendahnya transparansi anggaran dan minimnya pengawasan publik menyebabkan implementasi desentralisasi belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas publik menjadi agenda penting dalam reformasi desentralisasi.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah sangat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Transfer dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seharusnya berperan sebagai instrumen pemerataan. Namun, realitas menunjukkan adanya ketergantungan fiskal yang tinggi di banyak daerah. Penelitian oleh Haryanto dan Dewi (2021) menegaskan bahwa ketergantungan fiskal yang berlebihan membuat banyak daerah belum mandiri dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik, sehingga tujuan desentralisasi untuk mendorong kemandirian daerah belum sepenuhnya tercapai. Selain faktor fiskal, tingkat literasi masyarakat terhadap hak-hak pelayanan publik juga berpengaruh. Masyarakat yang memiliki literasi rendah cenderung pasif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan sulit dikontrol. Menurut Lestari (2020), partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dapat meningkat jika didukung dengan pendidikan politik dan literasi kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari penguatan desentralisasi.

Lebih lanjut, implementasi desentralisasi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan. Pelayanan publik bukan hanya persoalan administrasi jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian oleh Yuliani dan Prabowo (2023) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memasukkan prinsip keberlanjutan dalam pelayanan publik, seperti pengelolaan lingkungan dan pembangunan hijau, mampu menciptakan layanan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Hal ini menegaskan perlunya integrasi perspektif keberlanjutan dalam kebijakan desentralisasi. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik untuk memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga penting secara praktis untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis

bagaimana kebijakan desentralisasi diimplementasikan, apa saja faktor penghambat dan pendukungnya, serta bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam melalui interpretasi konteks, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif deskriptif efektif digunakan untuk menelaah implementasi kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kelembagaan, birokrasi, maupun partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus pada beberapa instansi pemerintah daerah, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Sulawesi Barat sebagai provinsi baru hasil pemekaran masih menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan dan fiskal, sehingga relevan untuk dikaji implementasi desentralisasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, daerah ini juga merepresentasikan kondisi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia yang relatif kurang mendapat sorotan dalam literatur kebijakan publik.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, aparat birokrasi, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan publik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), publikasi BPS, serta laporan kinerja dinas terkait. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi desentralisasi di Sulawesi Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali perspektif para aktor terkait mengenai praktik dan tantangan implementasi kebijakan desentralisasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata pelayanan publik di lapangan, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan laporan kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi desentralisasi di Sulawesi Barat. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan ini dilakukan secara simultan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat dipahami secara mendalam dan memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi desentralisasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan pada tiga level: sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai aktor; triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi; sementara triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan ulang data di momen berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Desain penelitian ini dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Desain Penelitian

Komponen	Uraian
Fokus Penelitian	Implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat, dengan menelaah aspek kebijakan, kapasitas birokrasi, kepemimpinan daerah, partisipasi masyarakat, dan kapasitas fiskal.
Teknik Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan), anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan penerima layanan publik. - Observasi terhadap praktik pelayanan publik di lapangan. - Studi dokumentasi pada dokumen resmi (RPJMD, LAKIP, laporan BPS, dan peraturan daerah).
Analisis Data	<p>Menggunakan model interaktif Miles & Huberman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data (memilah data relevan); - Penyajian data (narasi deskriptif), - Penarikan kesimpulan/verifikasi.
Triangulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber: membandingkan data dari pejabat, masyarakat, dan dokumen - Metode: mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. - Waktu: pengecekan ulang data di waktu berbeda.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, perumusan desain penelitian perlu dijelaskan secara sistematis agar fokus kajian, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta strategi keabsahan data dapat dipahami secara utuh. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat dengan menelaah aspek kebijakan, kapasitas birokrasi, kepemimpinan daerah, partisipasi masyarakat, dan kapasitas fiskal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan), anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan penerima layanan publik. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami praktik pelayanan secara langsung, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen resmi seperti RPJMD, LAKIP, laporan BPS, dan peraturan daerah.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta penerima layanan publik di Provinsi Sulawesi Barat. Selain

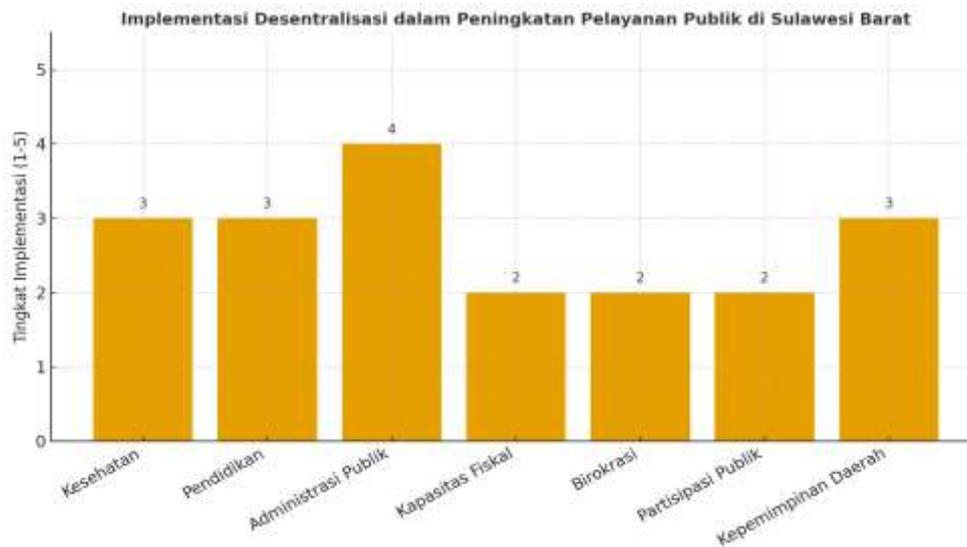
itu, data sekunder berupa RPJMD, laporan BPS, dan LAKIP juga digunakan untuk memperkuat temuan. Secara umum, implementasi kebijakan desentralisasi di Sulawesi Barat telah memberikan dampak terhadap peningkatan akses pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Namun, kualitas layanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antar daerah, serta lemahnya profesionalisme birokrasi. Pada sektor kesehatan, desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah, tetapi kualitas layanan masih terkendala keterbatasan tenaga medis dan sarana kesehatan. Hal serupa juga ditemukan dalam sektor pendidikan, di mana peningkatan jumlah sekolah sudah cukup baik, tetapi masih terdapat ketimpangan kualitas antar kabupaten.

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu sektor yang menunjukkan kemajuan. Implementasi sistem pelayanan berbasis digital, seperti pembuatan e-KTP dan layanan akta kelahiran, membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Namun, di daerah terpencil, keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan. Dari sisi kapasitas fiskal, sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada transfer pusat melalui DAU dan DAK. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan daerah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan secara mandiri. Hasil wawancara dengan pejabat daerah menunjukkan bahwa keterbatasan PAD menjadi tantangan utama dalam menjalankan kebijakan desentralisasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih cenderung formalitas. Forum Musrenbang yang seharusnya menjadi sarana utama aspirasi masyarakat belum sepenuhnya efektif, karena keputusan akhir masih didominasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya meningkatkan kualitas demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Tabel 2. Temuan Utama Penelitian Implementasi Desentralisasi di Sulawesi Barat

Aspek	Temuan Utama
Kesehatan	Akses layanan meningkat dengan pembangunan puskesmas/RSUD baru, tetapi kualitas terkendala keterbatasan tenaga medis dan fasilitas.
Pendidikan	Jumlah sekolah meningkat, namun kualitas masih timpang antar kabupaten.
Administrasi Publik	Layanan berbasis digital (e-KTP, akta kelahiran) mulai berjalan, tetapi daerah terpencil terkendala jaringan internet.
Kapasitas Fiskal	Ketergantungan tinggi pada DAU/DAK, PAD rendah, sehingga ruang inovasi daerah terbatas.
Birokrasi	Profesionalisme aparatur masih rendah; birokrasi

	patrimonial memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
Partisipasi Publik	Musrenbang sudah ada, namun masih bersifat formalitas; keputusan dominan di tangan elit politik dan birokrasi.
Kepemimpinan Daerah	Kepemimpinan kepala daerah yang visioner berpengaruh pada peningkatan inovasi, tetapi tidak merata di semua kabupaten/kota.



Gambar 1. Diagram Implementasi Desentralisasi Pelayanan Publik

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Sulawesi Barat

Implementasi kebijakan desentralisasi di Sulawesi Barat menunjukkan adanya perkembangan dalam aspek aksesibilitas pelayanan publik, meskipun kualitasnya masih belum merata. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan telah mengalami peningkatan dari sisi ketersediaan fasilitas, tetapi belum diimbangi dengan pemerataan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hal ini selaras dengan temuan Simanjuntak (2020) bahwa desentralisasi di Indonesia sering kali berhasil memperluas jangkauan layanan, namun gagal menciptakan pemerataan kualitas. Dalam konteks Sulawesi Barat, kondisi geografis dan fiskal menjadi faktor penting yang membatasi efektivitas kebijakan.

Dari perspektif kebijakan publik, desentralisasi di Sulawesi Barat sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah. Namun, perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota masih menjadi kendala

besar. Haryanto dan Dewi (2021) menjelaskan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat cenderung memiliki ruang inovasi yang terbatas. Kondisi ini juga terlihat di Sulawesi Barat, di mana PAD relatif rendah sehingga inovasi layanan publik berjalan lambat. Oleh karena itu, efektivitas desentralisasi di daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain aspek fiskal, faktor birokrasi juga menentukan implementasi kebijakan desentralisasi. Penelitian Kurniawan (2021) menekankan bahwa birokrasi patrimonial yang masih kuat di daerah menyebabkan pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, birokrasi di Sulawesi Barat masih menghadapi masalah profesionalisme dan merit system. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan desentralisasi yang ideal dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, perbaikan birokrasi tetap menjadi syarat utama keberhasilan desentralisasi di daerah.

Kepemimpinan daerah juga memainkan peran strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi. Wahyudi (2022) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional kepala daerah dapat mendorong inovasi pelayanan publik. Dalam konteks Sulawesi Barat, kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah dengan visi reformis cenderung lebih berhasil menciptakan program inovatif, seperti digitalisasi pelayanan kependudukan. Namun, inovasi ini belum merata di seluruh daerah, sehingga menunjukkan adanya perbedaan kualitas kepemimpinan antar wilayah. Faktor kepemimpinan ini semakin menegaskan pentingnya kapasitas aktor politik lokal dalam menggerakkan desentralisasi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan desentralisasi di Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan yang kompleks, meskipun terdapat capaian positif dalam akses pelayanan publik. Penelitian terbaru oleh Yuliani dan Prabowo (2023) menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh integrasi antara aspek kebijakan, kapasitas birokrasi, dan keberlanjutan pembangunan. Lebih jauh lagi, studi Nugraha (2025) menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital di daerah-daerah berkembang dapat mempercepat transformasi pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, desentralisasi di Sulawesi Barat perlu diperkuat dengan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas fiskal, serta pemanfaatan teknologi agar tujuan peningkatan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Desentralisasi

Implementasi kebijakan desentralisasi di Sulawesi Barat dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Dari sisi pendukung, adanya regulasi otonomi daerah serta dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK menjadi modal penting bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, kepemimpinan kepala daerah yang visioner serta komitmen birokrasi lokal dapat mendorong terbentuknya inovasi pelayanan publik. Hal ini terlihat di beberapa kabupaten yang mulai mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan kependudukan dan kesehatan. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal masih menjadi penghambat utama. Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Barat memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, sementara PAD relatif rendah. Kondisi ini membuat ruang inovasi daerah terbatas, karena pemerintah daerah lebih fokus pada belanja rutin ketimbang investasi peningkatan pelayanan. Masalah ini sejalan dengan studi terdahulu yang menyebutkan bahwa desentralisasi sering kali gagal optimal di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Dengan kata lain, ketimpangan fiskal antarwilayah masih menjadi tantangan besar.

Faktor penghambat lain adalah kualitas birokrasi yang masih belum sepenuhnya profesional. Praktik birokrasi patrimonial, politisasi jabatan, dan lemahnya penerapan merit system menyebabkan pelayanan publik cenderung lambat dan tidak responsif. Meskipun sudah ada upaya reformasi birokrasi, perubahan yang terjadi masih parsial dan belum menyentuh akar masalah. Hambatan birokrasi ini

diperburuk oleh rendahnya literasi digital aparatur di daerah terpencil, sehingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal. Partisipasi masyarakat juga masih terbatas dan cenderung formalitas. Forum Musrenbang, yang seharusnya menjadi sarana partisipasi substantif, lebih banyak dijalankan sekadar memenuhi prosedur. Aspirasi masyarakat kerap tidak tercermin dalam keputusan akhir, karena dominasi elit politik dan birokrasi masih kuat. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan pelayanan publik sesuai kebutuhan riil di lapangan. Rendahnya tingkat literasi kebijakan masyarakat juga membuat kontrol publik terhadap implementasi desentralisasi masih lemah.

Dari temuan penelitian terbaru, faktor pendukung seperti digitalisasi pelayanan dan kepemimpinan inovatif dapat menjadi modal besar bagi Sulawesi Barat untuk memperkuat desentralisasi. Yuliani dan Prabowo (2023) menekankan pentingnya inovasi publik berbasis keberlanjutan agar pelayanan lebih inklusif, sementara Nugraha (2025) menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik di daerah berkembang dapat mempercepat pemerataan pelayanan. Dengan demikian, tantangan fiskal, birokrasi, dan partisipasi masyarakat harus diatasi agar faktor pendukung dapat dioptimalkan dan kebijakan desentralisasi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat.

Peran Kepemimpinan Daerah dan Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan lokal yang visioner terbukti menjadi kunci dalam mendorong inovasi layanan publik. Kepala daerah yang mengusung reformasi efektif menciptakan lingkungan birokrasi yang responsif dan inovatif, sejalan dengan temuan Wahyudi (2022). Di Sulawesi Barat, beberapa kabupaten/kota menunjukkan peningkatan pelayanan administratif, terutama melalui digitalisasi, ketika dipimpin oleh tokoh yang berorientasi pada tata kelola modern dan keterbukaan publik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik, seperti melalui forum Musrenbang, masih bersifat formalitas. Studi Sari & Hidayat (2018) menegaskan bahwa meski ruang dialog telah dibuka, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Di Sulawesi Barat, praktik serupa terjadi: forum diadakan, tetapi keputusan akhir seringkali diambil tanpa menyerap aspirasi publik secara substansial.

Ketika partisipasi formal tidak diikuti dengan akuntabilitas publik, pengawasan terhadap birokrasi menjadi lemah. Lestari (2020) menemukan bahwa rendahnya literasi kebijakan masyarakat membuat kontrol politik atas kebijakan daerah tidak maksimal. Akibatnya, implementasi desentralisasi cenderung selektif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi partisipasi publik yang lebih substantif. Putri & Santoso (2023) menunjukkan bahwa kanal digital dan aplikasi layanan publik mampu mempercepat umpan balik masyarakat dan mendorong transparansi. Di Sulawesi Barat, ketika kanal digital diakses, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, terutama jika didukung oleh literasi digital yang memadai. Menurut penelitian terbaru, sinergi kuat antara kepemimpinan lokal dan partisipasi publik adalah fondasi keberlanjutan inovasi pelayanan. Irman Putra & Lubis (2025) menyoroti pentingnya reform-oriented leadership dalam menjaga momentum pembangunan publik yang inklusif dan adaptif. Sementara itu, Mulanda dkk. (2024) menemukan bahwa meskipun desentralisasi secara struktural membuka ruang partisipasi, hambatan seperti tokenism masih sering muncul—menegaskan perlunya upaya lebih untuk mewujudkan partisipasi yang nyata.

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Desentralisasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik di era desentralisasi menuntut strategi yang komprehensif, menggabungkan aspek kebijakan, birokrasi, dan teknologi. Sulawesi Barat sebagai provinsi baru menghadapi tantangan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga strategi peningkatan pelayanan harus berfokus pada efisiensi tata kelola dan pemanfaatan potensi lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengadopsi prinsip *good governance* sebagai dasar pembaruan pelayanan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Salah satu strategi

penting adalah penguatan kapasitas birokrasi. Aparatur pemerintah daerah harus dilatih agar memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik modern. Reformasi birokrasi yang berorientasi pada merit system perlu diimplementasikan secara konsisten untuk mengurangi politisasi jabatan dan memperbaiki profesionalisme aparatur. Menurut Putri & Santoso (2023), penguatan kapasitas SDM merupakan fondasi agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan berkualitas dan berkeadilan.

Selain aspek birokrasi, digitalisasi pelayanan publik menjadi katalis dalam mempercepat transformasi. Implementasi e-government, aplikasi layanan digital, dan sistem informasi publik memungkinkan pelayanan lebih cepat, transparan, dan inklusif. Nugraha (2025) menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik di daerah berkembang dapat mempersempit kesenjangan akses dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Di Sulawesi Barat, strategi ini bisa menjadi jawaban atas keterbatasan geografis yang membuat masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses layanan. Partisipasi masyarakat juga harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi peningkatan pelayanan. Pemerintah daerah perlu mendorong mekanisme partisipasi substantif, bukan sekadar formalitas. Penelitian Mulanda dkk. (2024) menekankan bahwa partisipasi yang bermakna akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi risiko tokenisme dalam perumusan program daerah. Pemanfaatan kanal digital untuk aspirasi publik juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

Akhirnya, strategi peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat memerlukan kepemimpinan lokal yang kuat dan berorientasi pada perubahan. Menurut Irman Putra & Lubis (2025), kepemimpinan reformis berperan penting dalam memastikan desentralisasi tidak hanya sebagai distribusi kewenangan, tetapi juga instrumen perbaikan kualitas layanan. Dengan kombinasi antara reformasi birokrasi, digitalisasi, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan visioner, Sulawesi Barat dapat memperkuat kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi di Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan dampak positif terutama pada perluasan akses pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala serius, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antarwilayah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur daerah. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan desentralisasi dan realitas implementasi di lapangan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan desentralisasi di Sulawesi Barat antara lain adanya dukungan regulasi pusat, komitmen kepala daerah yang visioner, serta inisiatif digitalisasi layanan publik. Namun, faktor penghambat yang signifikan meliputi ketergantungan pada dana transfer pusat, birokrasi yang belum profesional, serta partisipasi masyarakat yang cenderung formalitas. Interaksi antara faktor pendukung dan penghambat ini menentukan efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh besar terhadap arah dan kualitas implementasi desentralisasi. Kepala daerah yang memiliki visi reformis dan mampu menggerakkan birokrasi terbukti dapat mendorong inovasi pelayanan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang lebih substantif diperlukan agar kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperkuat literasi politik masyarakat serta memanfaatkan kanal digital sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengawasan kebijakan.

Strategi peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat menuntut adanya reformasi birokrasi berbasis merit system, penguatan kapasitas fiskal, digitalisasi layanan publik, dan kepemimpinan yang visioner. Pemerintah daerah juga perlu mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pelayanan publik, agar kualitas layanan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga adaptif terhadap tantangan masa depan. Sinergi antar faktor ini akan memperkuat efektivitas kebijakan

desentralisasi. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah pusat memberikan dukungan afirmatif kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah melalui transfer dana yang lebih proporsional dan berbasis kinerja. Pemerintah daerah perlu mempercepat transformasi digital serta memperluas kanal partisipasi publik yang inklusif. Selain itu, penguatan literasi politik masyarakat harus menjadi prioritas agar warga dapat lebih aktif mengawasi kebijakan daerah. Dengan strategi tersebut, implementasi desentralisasi di Sulawesi Barat dapat menjadi instrumen utama peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. (2019). Decentralization and public service delivery in Indonesia: Issues and challenges. *Journal of Public Administration Studies*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2019.004.02.2>
- Hakim, R. (2022). Accountability and transparency in decentralized governance: Challenges in Indonesian local governments. *Journal of Governance and Development*, 8(2), 134–148. <https://doi.org/10.15294/jgd.v8i2.4683>
- Haryanto, S., & Dewi, M. (2021). Fiscal dependency and autonomy in regional governance: An analysis of local government performance. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 55–70. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.13290>
- Hidayat, A.R. (2025). Why Democratization and Decentralization in Indonesia... [report].
- Irman Putra, & Lubis, A.F. (2025). Decentralisation and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity. [Journal unspecified], April 2024.
- Kurniawan, T. (2021). Bureaucratic reform and challenges of decentralization in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 23–40. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.3210>
- Lestari, D. (2020). Citizen participation and public service accountability in decentralization era. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(3), 673–682. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.03.212>
- Lubis, H. (2019). Central-local government relations in Indonesia's decentralization era. *Journal of Political Studies*, 12(2), 88–104. <https://doi.org/10.21009/jps.122.06>
- Mulanda, D., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Decentralization and Public Participation: A Literature Review on Impact and Implementation. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 57–68. <https://doi.org/10.62066/jpab.v11i1.17> (Adabi)
- Nugraha, Y., & Suryadi, T. (2024). E-government and public service transformation in Indonesia's local governments. *Journal of Public Administration Research*, 9(1), 56–70. <https://doi.org/10.31002/jpar.v9i1.5120>
- Pratama, R., & Nugroho, S. (2020). Fiscal capacity and disparities in local government service delivery in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 19(3), 245–259. <https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-3-05>
- Putri, A., & Santoso, D. (2023). Strengthening human resources capacity in local governance: A merit system perspective. *Journal of Governance and Integrity*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35917/jgi.v5i1.489>
- Rahman, F. (2021). Innovation in public service delivery under decentralization: Evidence from local governments in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 199–210. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.199-210>
- Sari, R., & Hidayat, F. (2018). Public participation in local government planning: A study of Musrenbang implementation. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(2), 145–159. <https://doi.org/10.18196/jgpp.5273>
- Simanjuntak, R. (2020). Regional inequality and decentralization in Indonesia: Challenges for equitable public services. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 25–39. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1712>

- Wahyudi, A. (2022). Transformational leadership and public service innovation in local government. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 27(1), 67–84. <https://doi.org/10.20473/jip.v27i1.35379>
- Yuliani, N., & Prabowo, H. (2023). Sustainable public service innovation in local governance: Toward inclusive and resilient development. *Journal of Sustainability Studies*, 5(1), 77–92. <https://doi.org/10.14710/jss.5.1.2023.77-92>